Pembangunan partisipatif,sebagai model pembangunan yang menerapkan konsep partisipasi , yaitu pola pembangunan yang melibatkan semua pihak (pelaku) dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi mereka yang terkena pembangunan. Artinya pembangunan yang melibatkan semua pemainnya dalam posisi yang setara untuk merumuskan kebutuhan, tujuan dan sasaran, langkah-langkah dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Pelibatan masyarakat, merupakan wujud dari (1)penghargaan terhadap keberadaan manusia yang merdeka yang berhak untuk menetapkan sendiri nasibnya tanpa ditentukan oleh pihak lain (2) kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia (3) kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama. Dari pengalaman masa lalu, tidak dilibatkannya manusia menapikan keadilan dan kesetaraan dan tanggung jawab sosial semua pihak telah menghancurkan aspek manusiawinya manusia. Apabila proses ini terus berlangsung semakin lama masyarakat akan menjadi semakin tidak berdaya. Di sisi lain perumusan program yang dilaksanakan hanya oleh kelompok tertentu banyak yang tidak berarti karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak terpelihara. Artinya masyarakat tidak pernah benar-benar menerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan, sehingga program tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya, tetapi hanya menguntungkan orang atau kelompok tertentu saja. Dalam proses pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi secara menerus sebagi satu daur. Oleh karena itu daur ini biasa disebut daur pembangunan partisipatif. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, daur program tersebut dikejawantahkan dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelibatan masyarakat, banyak pihak telah mengembangkan pendekatan/metodologi pembangunan partisipatif yang salah satu di antaranya adalah PRA (Participatory Rural Appraisal). Pendekatan ini menekankan kepada perubahan sikap dan perilaku sehingga dapat menjadi alternatif metodologi bagi PNPM Mandiri Perkotaan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Jelaskan kepada peserta, bahwa dalam proses pembangunan, pengorganisasian masyarakat

dimungkinkan dalam daur program pembangunan, yang dimulai dari menemukenali kebutuhan

(masalah dan potensi), merencanakan upaya pemecahan masalah, melaksanakan program

sampai monitoring evaluasi (daur program pembangunan). Hasil monitoring dan evaluasi

kemudian ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya, makanya disebut daur karena

kegiatan ini akan berulang. Dalam hal masyarakat yang mengorganisir dirinya sendiri (pihak

luar hanya memfasilitasi), maka daur program tersebut disebut sebagai daur program

pembangunan partisipatif.

Perempuan dan warga miskin sebagai kelompok yang masih terpinggirkan masih menjadi

objek pembangunan, padahal menjadi strategis melibatkan perempuan dalam proses

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi,

karena:

􀂃 Penghargaan terhadap perempuan dan waga miskin sebagai manusia yang merdeka

yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya

􀂃 Pemecahan masalah-masalah, termasuk masalah kemiskinan yang menyangkut

perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan karena

merekalah yang betul-betul merasakan masalah dan kebutuhannya. Keputusan yang

diambil hanya oleh kaum elite atau laki-laki saja seringkali hanya berhubungan dengan

dunia laki-laki dan tidak mempunyai sensitivitas terhadap masalah perempuan. Bila

memikirkan masalah perempuan seringkali dasarnya tidak kuat karena mereka tidak

mengalami masalahnya.

􀂃 Memberi kesempatan kepada perempuan dan warga miskin untuk menjalankan

tanggung jawab sosialnya sebagai manusia

􀂃 Potensi yang besar yang dipunyai oleh perempuan, akan sangat berarti apabila

digunakan bukan hanya untuk sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik

sehingga dapat dirasakan manfaanya oleh masyarakat

􀂃 Keterlibatan dalam semua proses pembangunan memberikan kesempatan untuk

mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

Catatan: langkah-langkah penanggulangan kemiskinan di masyarakat merupakan satu siklus

(daur yang harus berulang). Dari semua tahapan siklus, harus dijelaskan mana yang masuk

ke dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Siklus

penanggulangan kemiskinan ini seyogyanya merupakan langkah yang dijalankan oleh

adanya kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata untuk PNPMM Perkotaan , karena

PNPMM Perkoataan hanya meletakan pondasi awalnya, sehingga setelah proyek selesai

langkah-langkah ini akan menjadi bagian program masyarakat yang berkelanjutan.

**Langkah-Langkah Pembangunan-Partisipatif**

**Parwoto**

Untuk menjamin terjadinya proses belajar dari semua pelaku pembangunan baik di sektor

pemerintah, swasta dan masyarakat maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

penyelenggaraan pembangunan partisipatoris mencakup kegiatan di berbagai tingkat sebagai

berikut ini

**Di Tingkat Non Komunitas (Pemerintah dan Pihak Terkait)**

Mengingat pola pembangunan partisipatoris meskipun berakar dari budaya bangsa tetapi dalam

praktek manajemen pembangunan belum lazim dilakukan maka diperlukan beberapa kegiatan yang

bersifat orientasi, konsultasi dan pelatihan untuk membuka wawasan sehingga terjadi pemahaman

akan peran masing-masing dalam konteks demokratisasi pembangunan dan terjadi perubahan

sikap dari perangkat pemerintah dan pihak terkait serta keterpaduan misi pembangunan makro.

**Di Tingkat Komunitas/Masyarakat**

Berbentuk proses penyadaran, pelatihan dan pembentukan sikap yang melahirkan kesepakatankesepakatan

pembangunan dan rencana tindak sebagai tersebut dibawah ini (lihat Lampiran 1).

**a Persiapan sosial**

Langkah ini merupakan langkah awal sebelum memulai pembangunan partisipatoris, yaitu

suatu upaya untuk mendekati para pimpinan dan tokoh masyarakat, mengenali persoalan dan

kebutuhan masyarakat, dan upaya untuk memulai membahasnya dengan para pimpinan dan

tokoh masyarakat tersebut.

Hasil

Para pimpinan dan tokoh masyarakat sepakat untuk menangani persoalan yang dihadapi

masyarakat/komunitas.

**b Survai Swadaya**

Melalui SS ini beberapa anggota masyarakat mulai diajak dan didampingi untuk mengenali

persoalan yang dihadapi kampung/desa mereka dan potensi yang mungkin dapat

dikembangkan dari sumber daya yang ada untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hasil

Masyarakat sadar akan kondisi mereka dan daftar persoalan serta potensi

komunitas/lingkungan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)

**c. Kesepakatan persoalan yang akan ditanggulangi**

Pada tahap ini persoalan yang ditemukan melalui SS dibahas dalam suatu rembug

kampung/desa untuk ditetapkan mana dulu yang akan ditangani.

Hasil

Daftar dan urutan prioritas persoalan yang disepakati untuk ditangani.

**Kesepakatan tingkat perbaikan yang ingin dicapai**

Setelah adanya kesepakatan persoalan yang akan ditanggulangi langkah selanjutnya adalah

menetapkan bersama tingkat perbaikan yang akan/ingin dicapai. Kesepakatan tingkat

perbaikan ini merupakan tujuan akhir yang akan dicapai. Pada tahap ini harus diupayakan

terjadinya kebulatan tekad untuk bersama-sama saling tolong menolong mencapai tujuan

tersebut.

Hasil

Gambaran kondisi yang ingin dicapai setelah pembangunan yang disepakati sebagai tujuan

akhir.

**e Kesepakatan tentang hambatan-hambatan yang mungkin ditemui dalam mencapai**

**tingkat perbaikan yang telah disepakati tersebut diatas.**

Pada tahap ini sebenarnya yang terjadi adalah proses mawas diri "mengapa tujuan akhir

tersebut di atas tidak pernah terjadi sebelumnya?" Hal ini penting dilakukan untuk menemukan

apa yang sebenarnya terjadi di kampung/desa tersebut sehingga dari dahulu tidak pernah

mencapai kondisi seperti yang diharapkan di atas.

Hasil

Daftar antisipasi hambatan yang perlu disingkirkan agar tercapai tujuan akhir yang disepakati

tersebut di atas. Hambatan ini dapat bersifat fisik, aturan, tradisi, dsb

**f Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya untuk menciptakan dan**

**menumbuhkan potensi pembangunan.**

Pada tahap ini dilakukan kesepakatan penanganan penggalian, penggalangan dan

pengembangan sumber daya sebagai potensi pembangunan untuk di alokasikan dalam proses

pemecahan persoalan.

Hasil

Daftar berbagai sumber daya (internal/eksternal) yang dapat dikerahkan untuk menanggulangi

persoalan dan mencapai tujuan akhir yang telah disepakati.

**g Kesepakatan rencana pemecahan persoalan**

Pada tahap ini dipilih dan disepakati alternatif penanggulangan persoalan dalam bentuk

USULAN RENCANA KERJA PENANGGULANGAN PERSOALAN, mencakup

• Usulan rencana teknik (kegiatan yang akan dilakukan)

• Usulan pola pendanaan (pendanaan/pembiayaan)

• Usulan manajemen/pola penanganan (kelembagaan)

• Usulan pengelolaan lanjut (kelembagaan)

Selanjutnya usulan tersebut bila memerlukan bantuan dana dari APBD/APBN dapat diajukan

melalui Camat ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil

Rencana Kerja Pembangunan (program pembangunan/development program)

**h Pelaksanaan**

Pola penanganan pelaksanaan ini telah disepakati pada tahap sebelumnya, maka pada tahap ini

hanya tinggal melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Sebaiknya proses pelaksanaan ini

menerapkan ancangan manajemen terbuka, dimana segala informasi dengan mudah dapat

dibaca/diketahui oleh semua anggota masyarakat yang terlibat/terkena, misalnya dengan menuliskan pada papan tulis di Balai Desa segala sesuatu yang perlu diketahui masyarakat,

nilai bantuan, kontribusi tiap warga, sumbangan dari pihak lain, penggunakan dana, dll

Hasil

Sesuai yang direncanakan (fisik bangunan/lingkungan, kegiatan usaha, sistem perkreditan yang

lebih baik, dsb).

**i Evaluasi internal**

Tahap ini sering kali dilupakan pada hal pada tahap inilah sebenarnya terjadi proses peralihan

dari pengalaman fisik menjadi pengalaman mental yang sangat bermanfaat dalam mengubah

perilaku

Hasil

Pendalaman pemahaman dan perubahan sikap

**j Pemanfaatan hasil pembangunan.**

Pada tahap inilah terjadi proses berlanjut yang bersifat siklik dan organik, bila yang dibangun

fisik maka akan ditandai dengan adanya pemeliharaan, perbaikan, penambahan, perombakan,

pengulangan sebagai bukti perubahan sikap dan perilaku, tetapi bila yang dibangun adalah

kegiatan usaha maka akan ditandai dengan membaiknya ekonomi keluarga dan bertumbuhnya

kegiatan ekonomi kawasan, dsb.

Semuanya ini hanya akan terjadi bila tercapai kemantapan kelembagaan yang mengelola

seluruh kegiatan tersebut dari awal sampai akhir.

Semuanya ini hanya akan terjadi bila tercapai kemantapan kelembagaan yang mengelola

seluruh kegiatan tersebut dari awal sampai akhir.

Hasil

Pertumbuhan atau perubahan yang organik baik dalam bentuk fisik lingkungan maupun

kegiatan ekonomi atau tatanan sosial yang ada

**Perencanaan Kegiatan**

Apabila penjajakan kebutuhan (need assesment) semula berkembang sebagai wacana pengambilan

keputusan publik di dalam kerangka demokrasi, maka perencanaan pada awalnya berkembang

dalam wacana pengelolaan (manajemen) program. Wacana mengenai program berbasis

masyarakat (people centered approach) kemudian juga mendorong berkembangnya metodologi

perencanaan partisipatif (participatory planning approach) dengan mengembangkan proses

perencanaan dari bawah (bottom up planing).

Meskipun berbagai modifikasi dan adaptasi dilakukan untuk mengembangkan proses partisipatif

bersama masyarakat, perencanaan tetap merupakan aspek pengelolaan (manajemen) program

yang menggunakan logika dan kerangka pikir tertentu. Perencanaan adalah proses pengambilan

keputusan untuk menentukan tujuan kegiatan/program , memilih jenis-jenis kegiatan, menyiapkan

sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah dilakukan.

Biasanya ketika bekerja dengan masyarakat, ada 3 level perencanaan yang dilakukan yaitu:

perencanaan tingkat masyarakat, perencanaan tingkat program, dan perencanaan tingkat lembaga.

Masing-masing level mengembangkan jenis perencanaan yang berbeda dan berkaitan satu sama

lain. Perencanaan di tingkat lembaga (perencanaan program maupun perencanaan

lembaga/organisasi) dimunculkan dari kebutuhan masyarakat dampingan.

Perencanaan kegiatan merupakan proses mengembangkan rencana kerja berdasarkan penjajakan

kebutuhan yang telah dilakukan. Hasil kajian masalah dan potensi masyarakat dijadikan bahan

untuk menyusun rencana kegiatan yang sederhana, jelas dan realistis. Artinya bentuk perencanaan

ini benar–benar dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Hasil rumusan masalah dan potensi-potensi, dijabarkan menjadi:

􀂃 Penetapan prioritas masalah berdasarkan kriteria masyarakat.

􀂃 Alternatif alternatif pemecahan untuk setiap masalah

􀂃 Alternatif-alternatif kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan ketersediaan sumber daya baik

lokal maupun dari luar

􀂃 Penentuan para pelaksana, penanggung jawab dan pendamping kegiatan

Rencana kegiatan yang dikembangkan perlu mencantumkan dengan jelas apa, bagaimana, siapa,

untuk apa, untuk siapa dan kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Semakin konkrit dan jelas

rencana yang dihasilkan semakin besar kemungkinan rencana kegiatan dilakukan berdasarkan hasil

keputusan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sebaiknya diorganisir dan dipimpin oleh anggota masyarakat sendiri,

sedangkan petugas lembaga program hanya mendampingi.

**Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi Program**

Monitoring dan evaluasi adalah bagian dari pengelolaan (manajemen) program. Monev merupakan

kegiatan yang semestinya diintegrasikan dengan perencanaan sejak awal. Pada saat dilakukan

perencanaan program, semestinya sudah dirumuskan ukuran-ukuran (kuantitatif maupun kualitatif)

pencapaian program, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan monev setelah kegiatan

berjalan. Merencanakan monev yang diperlukan dalam pengembangan program, merupakan bagian

dari perencanaan yang baik.

Monitoring merupakan kegiatan pengelolaan program, yang dirancang untuk:

Melakukan kajian mengenai berlangsungnya kegiatan/program secara periodik apakah berjalan

sesuai dengan rencana/tujuan yang ditetapkan sebelumnya ataukah terjadi perubahan.

􀂃 Melakukan perekaman secara sistematis mengenai inormasi perkembangan kegiatan/program

beserta analisa dan gagasan (rekomendasi) mengenai penyesuaian/modifikasi

kegiatan/program yang perlu dibuat; biasanya dalam bentuk progress report.

􀂃 Mengembangkan tradisi pembelajaran (refleksi-aksi-refleksi ) baik untuk masyarakat

dampingan maupun staf lembaga pendamping agar secara terus menerus memperbaiki dan

menyempurnakan kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak awal dipantau terus menerus untuk melihat apakah

rencana yang telah disusun bersama dilaksanakan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat

pelaksanaan. Penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan dipelajari dan diperbaiki agar

tetap dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Monitoring ini bertujuan untuk menilai apakah program memang berjalan pada arah yang benar,

mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, memperkirakan

antisipasi yang dibutuhkan untuk menjaga alur pelaksanaan program.

Pemantauan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek ( per 3 bulan atau 6 bulan)

hasilnya disusun ke dalam ‘buku dokumentasi perkembangan program’.

Monitoring dilaksanakan secara partisipatif, artinya masyarakat lah yang menjadi pelaku bukan

Fasilitator (Orang Luar)

**Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan pengelolaan program, yang dirancang untuk:

􀂃 Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan relevansi program terhadap kondisi masayrakat

setelah berlangsungnya program tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu;

􀂃 Bagi masyarakat, menggunakan hasil-hasil yang dicapai untuk merencanakan pengembangan

kegiatan baru yang lebih bertumpu pada kemampuan (potensi dan sumberdaya) lokal.

􀂃 Bagi lembaga pendamping, menganalisis hasil-hasil yang dicapai untuk digunakan dalam

perencanaan, penyusunan kebijakan dan strategi program lembaga ke depan.

􀂃 Mengkaju dampak program terhadap kehidupan mesyaraka, dampak artinya perubahan yang

terjadi di masyarakat.

􀂃 Forum pengambilan keputusan masyarakat mengenia tujuan dan kegiatan baru yang ingin

dikembangkan.

􀂃 Merupakan pembelajaran (refleksi-aksi-refleksi) baik untuk masyarakat dampingan

maupun staf lembaga pendamping (Fasilitator)

􀂃 Evaluasi kegiatan juga dimaksudkan sebagai proses belajar bersama untuk menilai pencapaian

hasil kegiatan, kesesuaian rencana dan tindakan dan mengidentifikasi permasalahan yang

muncul secara terus menerus.

Biasanya, terdapat dua macam evaluasi program, yaitu:

Evaluasi setelah melihat adanya perkembangan-perkembangan atau perubahan-perubahan yang

terjadi di masyarakat dengan adanya kegiatan bersama (program), dilakukan setelah satu jangka

waktu tertentu (misal: per tahun)

**Evaluasi akhir program**, dilakukan antara lain untuk:

􀂃 Mengkaji tujuan program, apa saja yang sudah tercapai serta mengapa terjadi demikian.

􀂃 Mengkaji pengaruh program terhadap kesejahteraan masyarakat (disebut studi dampak) Evaluasi juga merupakan proses identifikasi awal untuk daur selanjutnya, sehingga program yang

sudah ada bisa diperbaiki secara menerus sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah yang

berkembang di masyarakat.

Evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sendiri yang merasakan manfaat dari

kegiatan-kegiatan yang dikembangkan.

Daur program merupakan kegiatan yang terus menerus sehingga dapat dijamin keberlanjutan dari

program-program untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

**Siklus PNPM Mandiri Perkotaan: Implementasi Daur Program**

**Pembangunan Partisipatif**

Marnia Nes

Siklus yang dikembangkan dalam intevensi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan merupakan pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif dari mulai

identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitong evaluasi.

**Siklus 1: Rembug Kesiapan Masyarakat ( RKM )**

Merupakan proses awal dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Siklus ini dilaksanakan karena PNPM

Mandiri Perkotaan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang diintervensi oleh pihak luar

( pemerintah ), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan

berkehendak untuk menerima atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alternatif pemecahan

masalah. Oleh karena itu RKM merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan

partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan

upaya penanggulangan kemiskinannya sendiri.

Apabila masyarakat memutuskan untuk menerima PNPM Mandiri Perkotaan, maka secara otomatis

masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan

dengan koridor yang sudah dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu melaksanakan

proses pembelajaran dalam daur penanggulangan kemiskinan secara partisipatif yang

dikejawantahkan dalam tahapan siklus-siklus selanjutnya.

Komitmen yang disepakati oleh masyarakat berimplikasi kepada beberapa konsekuensi yang harus

dijalankan oleh mereka seperti: mengikuti pertemuan-pertemuan untuk melaksanakan setiap

proses tahapan siklus, adanya motor penggerak yang bekerja dengan sukarela, kesediaan untuk

bekerjasama dari berbagai pihak ( tokoh, masyarakat miskin, masyarakat non miskin, aparat

pemerintah setempat, dll ), menyediakan dana swadaya untuk berbagai pertemuan dan pelatihan,

dan sebagainya.

Dengan mengetahui segala konsekuensi yang harus dihadapi diharapkan masyarakat betul-betul

siap untuk menerima intervensi PNPM Mandiri Perkotaan bukan karena ’iming-iming’ BLM akan

tetapi karena benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan upaya penanggulangan

kemiskinan bersama-sama.

**Siklus 2: Refleksi kemiskinan**

Refleksi Kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar

penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali

dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’ seringkali masyarakat

diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari

masalah yang sebenarnya ( masalah dirumuskan oleh ’Orang Luar’ ).Kondisi tersebut menyebabkan

dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak ’Orang Luar’ atau

karena tergiur dengan ’iming-iming’ bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benarbenar

menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.